

ABSTRAK

Dalam perkembangan dunia bisnis kita mengenal berbagai macam perjanjian salah satunya adalah perjanjian sewa beli. Perjanjian ini tumbuh di masyarakat seiring perkembangan jaman. Semakin banyaknya orang yang menyewakan mobilnya untuk disewakan, sedangkan mobil tersebut masih dalam masa angsuran. Hal inilah yang menyebabkan sistem sewa beli semakin dikenal oleh masyarakat. Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil di PT. ANDALAN FINANCE Semarang. 2) Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan apabila pihak pembeli melakukan wanprestasi.

Perjanjian sewa beli di Indonesia sebenarnya belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam prakteknya sewa beli itu sendiri diperbolehkan oleh undang-undang berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa seseorang mempunyai kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian serta menentukan hukum yang berlaku dalam perjanjian tersebut. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli di PT. ANDALAN FINANCE SEMARANG dan apa upaya hukum yang dilakukan apabila pihak pembeli melakukan wanprestasi. Penulis menggunakan penelitian dengan metode lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari hasil kegiatan di lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak PT. ANDALAN FINANCE SEMARANG, untuk mendapatkan keterangan terkait dengan pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil.

Hasil yang penulis dapatkan berdasarkan rumusan masalah yang dibahas tentang pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil di PT. ANDALAN FINANCE SEMARANG, yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak dan pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil di PT. ANDALAN FINANCE SEMARANG sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Bisa kita lihat dari yang dijadikan objek sewa beli adalah mobil yang merupakan barang yang halal dan bukan merupakan barang terlarang. Orang yang melakukan perjanjian harus sudah cakap hukum dan dilakukan tanpa paksaan dari orang lain. Apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini, upaya hukum yang bisa dilakukan adalah dengan cara mediasi, apabila cara ini belum menemukan jalan keluar maka pihak penjual sewa melakukan pelaporan kepolisian. Tetapi kalau cara ini masih belum menemukan jalan keluar maka cara terakhir adalah dengan cara sidang pengadilan.

Kata Kunci: Perjanjian, sewa beli

ABSTRACT

In the world of business development we recognize various kinds of agreements, one of these is a lease agreement. This agreement arise in the social community along the times. For example, a lot of people are lending out their cars for rent, even though the cars still in the time of instalment. This is what it makes the lease system increasingly known by the social community. The objectives of the study are 1) To find out the implementation of a car lease agreement at PT. ANDALAN FINANCE Semarang. 2) To find out the legal remedies carried out if the buyer defaults.

The lease agreement in Indonesia actually has not been regulated yet in the book of civil law act (KUHPperdata). The implementation of the lease agreement itself is permissible by law based on Article 1338 Section 1 in the Book of Civil Law Act as it statement that a person has an immunity to take on to the agreement with anybody, and the determination of agreement and adjust it with an applicable law in that agreement. The research of this essay is discussing towards about processing of lease agreement in Andalan Finance Semarang Ltd and the legal effort to take care of the buyer's default. The author is using the field method which is the research collecting the data from the direct activity on the field. The technic of this data collecting research is doing the interview with an employee of the Andalan Finance Semarang Ltd to get some of related information about the cars lease agreement.

The author's outcome based on the formulation of the problem discussed about the lease agreement in the Andalan Finance Semarang Ltd which regulated in Article 1338 Section 1 in the Book of Civil Law Act about the principal of contract freedom and Article 1320 in the Book of Civil Law Act about the terms of agreement, the statement of implication about the cars lease agreement in Andalan Finance Semarang Ltd has in accordance with the applicable law in Indonesia. As we can see from the objects of lease agreement are cars which is the halal goods and not the prohibited goods. For the people whom doing the agreement supposed to be known about the law and doing it without the force from another parties. If there is one of parties feel disadvantage in this case, mediation can become the legal effort to solve the problem, if the mediation's way could not be reached to the deal of solving the problem then the sellers party will submit the report of the case to the Police. However, convene in the court will be the good way to solve the problem if the case still does not reach the agreement for both of the parties.

Key words: Agreement, hire and purchase